



#2024  
KKP BEYOND

# LAPORAN KINERJA

## TAHUN 2024 TRIWULAN III



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGENDALIAN MUTU DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BPPMHKP / SKIPM ACEH



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,  
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh tahun 2024 Triwulan III telah selesai disusun. Laporan ini untuk menyajikan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Aceh tahun 2024 triwulan III dilakukan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Aceh dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta berdasarkan perkembangan indikator yang ada.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi salah satu sarana akuntabilitas dan menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan seluruh jajaran dalam rangka memacu kinerja lebih baik ke depan serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna peningkatan kinerja SKIPM Aceh pada masa yang akan datang.

Aceh Besar, 11 Oktober 2024

Kepala SKIPM Aceh,



Diky Agung Setiawan S.St.Pi, M.Si

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	2
i Daftar Isi.....	3
ii Daftar Gambar.....	4
iv Daftar Tabel... ..	5
v Ringkasan Eksekutif .....	6
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>8</b>
1.1. Latar Belakang .....	8
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
1.3 Arah Kebijakan Strategis.....	11
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>12</b>
2.1. Sasaran Strategis Tahun 2024.....	12
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024.....	12
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>17</b>
3.1. Pengukuran Kinerja .....	17
3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja .....	21
3.3. Anggaran .....	63
3.4. Sumber Daya Manusia .....	64
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Tahun 2024.....	10
Gambar 2.	Sasaran Strategis Tahun 2024 .....	12
Gambar 3.	Sasaran Kinerja Tahun 2024 Dalam Aplikasi Kinerja .....	18
Gambar 4.	Tampilan Aplikasi Kinerja Tahun 2024 Triwulan III.....	18
Gambar 5.	<i>Capture</i> Capaian Kinerja Dalam Aplikasi Kinerja Tahun 2024 Triwulan III.....	19
Gambar 6.	<i>Capture</i> Sertifikat <i>Traceability</i> Di Provinsi Aceh Tahun 2024.....	28
Gambar 7.	Kegiatan Inspeksi Penerapan HACCP di UPI Tahun 2024 Triwulan III .....	32
Gambar 8.	<i>Capture</i> Portal Penilaian Hasil SKM Tahun 2024 Triwulan III.....	36
Gambar 9.	<i>Capture</i> Aplikasi Sidak KKP Tahun 2024 Triwulan III .....	49
Gambar 10.	Komposisi Pagu dan Detail Realisasi Tahun 2024 Triwulan III.....	63
Gambar 11.	Komposisi Alokasi dan Realisasi dan Partisipasi Satuan Kerja Tahun 2024 Triwulan III.....	65

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja Tahun 2024.....	13
Tabel 2.	Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Triwulan III.....	15
Tabel 3.	Target dan Realisasi IKS 01.1 Tahun 2024 Triwulan III.....	21
Tabel 4.	Data Sertifikat CPIB Suplier Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan III.....	22
Tabel 5.	Target dan Realisasi IKS 01.2 Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan III.....	24
Tabel 6.	Target dan Realisasi IKS 01.3 Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan III.....	27
Tabel 7.	Target dan Realisasi IKS 01.4 Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan III.....	30
Tabel 8.	Data Ruang Lingkup Produk Yang Dijamin Melalui Sertifikasi Sistem HACCP (Produk) Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan III.....	31
Tabel 9.	Target dan Realisasi IKS 01.5 Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan III.....	33
Tabel 10.	Target dan Realisasi IKS 02.1 Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan III.....	36
Tabel 11.	Target dan Realisasi IKS 02.2 Tahun 2024 Triwulan III.....	38
Tabel 12.	Target dan Realisasi IKS 03.1 Tahun 2024 Triwulan III.....	41
Tabel 13.	Target dan Realisasi IKS 03.2 Tahun 2024 Triwulan III.....	44
Tabel 14.	Target dan Realisasi IKS 03.3 Tahun 2024 Triwulan III.....	46
Tabel 15.	Target dan Realisasi IKS 03.4 Tahun 2024 Triwulan III.....	48
Tabel 16.	Target dan Realisasi IKS 03.5 Tahun 2024 Triwulan III.....	51
Tabel 17.	Target dan Realisasi IKS 03.6 Tahun 2024 Triwulan III.....	54
Tabel 18.	Target dan Realisasi IKS 03.7 Tahun 2024 Triwulan III.....	56
Tabel 19.	Target dan Realisasi IKS 03.8 Tahun 2024 Triwulan III.....	58
Tabel 20.	Target dan Realisasi IKS 03.9 Tahun 2024 Triwulan III.....	61
Tabel 21.	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan.....	65
Tabel 22.	Data PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan .....	66

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara umum, SKIPM Aceh telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2024. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis (SS) dan indikator kinerja (IK) yang telah ditetapkan.

Dari seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kerja SKIPM Aceh tahun 2024, seluruhnya memenuhi dan melebihi target yang telah ditetapkan. Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) SKIPM Aceh hingga akhir triwulan III adalah sebesar 114, 35 %. Berdasarkan hasil pengukuran melalui aplikasi kinerja dengan sasaran strategis sebanyak 3 sasaran dan terdiri dari 16 indikator kinerja masuk dalam kategori istimewa (berwarna biru). Nilai NPSS tersebut ditunjukkan dari pencapaian sasaran strategis (SS) dan target Indikator Kinerja SKIPM Aceh sampai akhir periode triwulan III adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran strategis “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif” dengan beberapa indikator kinerja sebagai berikut:
  - a. Jumlah Sertifikat CPIB Suplier Yang Diterbitkan, dengan target tahunan 2024 sebanyak 5 sertifikat, sampai dengan akhir tahun 2024 triwulan III telah tercapai sebanyak 11 produk serta persentase sebesar 120 %.
  - b. Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik, dengan target tahun 2024 sebanyak 2 lokasi, pada periode triwulan III belum dilakukan perhitungan dan akan dilakukan pada periode semester II atau akhir tahun.
  - c. Unit Penanganan Dan/Atau Pengolahan Ikan Yang Menerapkan Sistem *Traceability* dengan target tahun 2024 sebanyak 5 UPI, pada periode triwulan III terdapat target sebanyak 2 UPI dan tercapai sebesar 100 %.
  - d. Ruang Lingkup Produk Yang Dijamin Melalui Sertifikasi Sistem HACCP dengan target tahun 2024 sebanyak 30 produk, secara kumulatif hingga akhir triwulan III telah tercapai sebanyak 28 produk serta persentase sebesar 120 %.
  - e. UPI Yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan dengan target tahun 2024 sebanyak 15 UPI, sampai dengan akhir triwulan III dapat tercapai melebihi target sebanyak 15 UPI (berdasarkan data nomor SKHS), sehingga persentasenya sebesar 120 %.
2. Pencapaian sasaran strategis “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif” yang masuk kategori Indikator Kinerja Material (IKM) dengan beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Di UPT BPPMHKP Aceh dengan target tahun 2024 senilai 84, pada akhir triwulan III dapat tercapai melebihi target sebesar 91,94 dari target 84 sehingga persentasenya sebesar 109,45 %;;
  - b. Lokasi Usaha Perikanan Yang Menerapkan *Quality Assurance* Sesuai Standar Sistem dan Regulasi Lingkup UPT BPPMHKP Aceh, dengan target tahun 2024 sebanyak 2 lokasi, ditargetkan dapat tercapai sesuai dengan target pada akhir tahun.
3. Pencapaian sasaran strategis “Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPPMHKP” dengan beberapa indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT BPPMHKP Aceh dengan target indeks tahun 2024 sebesar 86, pada periode triwulan III tidak dilakukan perhitungan dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun 2024;
  - b. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT BPPMHKP Aceh dengan target tahun 2024 senilai 82, ditargetkan dapat tercapai pada periode akhir tahun;
  - c. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT BPPMHKP Aceh dengan target tahun 2024 sebesar 100 %, ditargetkan dapat tercapai pada periode akhir tahun;
  - d. Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT BPPMHKP Aceh dengan target tahun 2024 sebesar 80 %, dapat tercapai melebihi target sebesar 94,87 % dari target 80 %, sehingga persentasenya 118,59 %;
  - e. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT BPPMHKP Aceh dengan target tahun 2024 senilai 93,75, pada periode akhir tahun akan dilakukan perhitungan kembali;
  - f. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT BPPMHKP Aceh dengan target tahun 2024 senilai 82, ditargetkan dapat tercapai pada periode akhir tahun.
  - g. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup BPPMHKP Aceh dengan target tahun 2024 sebesar 80 %, ditargetkan dapat tercapai pada periode akhir tahun.
  - h. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPMHKP Aceh dengan target tahun 2024 sebesar 80 ditargetkan dapat tercapai pada periode akhir tahun.
  - i. Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk Meraih Predikat WBK Lingkup BPPMHKP Aceh dengan target tahun 2024 sebesar 75, ditargetkan dapat tercapai pada periode akhir tahun.

Realisasi anggaran SKIPM ( BPPMHKP) Aceh sampai dengan tahun 2024 triwulan III sebesar Rp. 3.666.756.402,- atau mencapai 74,81 % dari alokasi anggaran tersedia sebesar Rp. 4.901.646.000, . Realisasi anggaran tersebut dilaksanakan pada kegiatan pengendalian mutu serta dukungan manajemen internal.

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. SKIPM Aceh atau BPPMHKP Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah koordinasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) yang selanjutnya disebut Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pasa saat ini transformasi BKIPM ke BPPMHKP masih dalam proses hingga ke seluruh UPT di Indonesia. Diharapkan seluruh proses perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) ini dapat segera selesai sehingga berdampak pada kegiatan yang transformatif dan inovatif untuk mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat yang akan terus berkembang.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja SKIPM Aceh. Selain itu untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### 1.2. Tugas, Fungsi Struktur Organisasi

Seiring dengan perubahan SOTK di Kementerian Kelautan dan Perikanan, peraturan terkait tugas dan fungsi organisasi terbaru masih dalam proses penyusunan di tingkat pusat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari satu area ke area yang lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan system manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sebelumnya, Unit Pelaksana teknis Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan pemantauan, evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- b. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari satu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya hama dan penyakit ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan negara tujuan;
- d. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina / hama dan penyakit ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi dan invasif, serta benda lain;
- e. Pelaksanaan pengujian terhadap hama dan penyakit ikan karantina hama dan penyakit ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan , dan keaneka ragaman hayati ikan;
- f. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (*biosecurity*);
- g. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- h. Pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit ikan tertentu;
- i. Pelaksanaan pemantauan terhadap hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan;
- j. Pelaksanaan pengawasan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan hayati ikan;
- k. Pelaksanaan surveilan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan;
- l. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dan dalam rangka sertifikasi penerapan manajemen mutu terpadu;
- m. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- n. Penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan;
- o. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
- p. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam menjalankan tugasnya, sampai dengan triwulan II tahun 2024 SKIPM Aceh mempunyai pegawai atau sumber daya manusia sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang pegawai baik ASN maupun Non ASN. Adapun struktur organisasi SKIPM Aceh dapat dilihat dalam Gambar 1. sebagai berikut.

**Gambar 1. Struktur Organisasi Tahun 2024**



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, SKIPM Aceh dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsi hingga pada tahun 2024 dalam melaksanakan misi yang telah ditentukan dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja SKIPM Aceh.

### 1.3. Arah Kebijakan Strategis

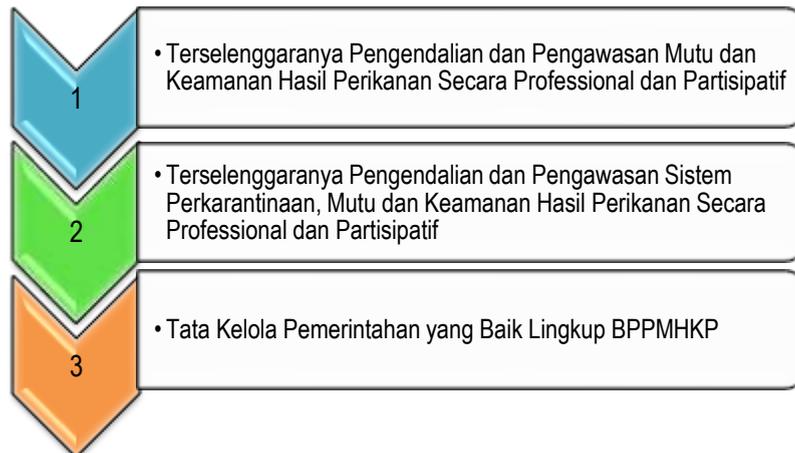
Arah kebijakan dan strategis pembangunan SKIPM / BPPMHKP Aceh dilaksanakan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan. Pada saat ini secara internal, hal strategis yang menjadi isu adalah terkait susunan organisasi dan tata kerja UPT BPPMHKP yang masih dalam proses penyusunan di tingkat pusat, sehingga menuntut satuan kerja untuk dinamis, adaptif dan efisien dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sasaran strategis yang dimiliki satuan kerja SKIPM Aceh pada saat ini adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif dengan didukung dengan indikator kinerja : Jumlah Sertifikat CPIB Suplier Yang Diterbitkan; Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik; Unit Penanganan Dan/Atau Pengolahan Ikan Yang Menerapkan Sistem Traceability; Ruang Lingkup Produk Yang Dijamin Melalui Sertifikasi Sistem HACCP dan UPI Yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan.
2. Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif dengan didukung dengan indikator kinerja : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Di UPT BPPMHKP Aceh dan Lokasi Usaha Perikanan Yang Menerapkan *Quality Assurance* Sesuai Standar Sistem Dan Regulasi Lingkup UPT BPPMHKP Aceh.
3. Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPPMHKP dengan didukung dengan indikator kinerja : Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT BPPMHKP Aceh; Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT BPPMHKP Aceh; Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT BPPMHKP Aceh; Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT BPPMHKP Aceh; Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT BPPMHKP Aceh; Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT BPPMHKP Aceh; Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPPMHKP Aceh; Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPMHKP Aceh; dan Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk Meraih Predikat WBK Lingkup BPPMHKP Aceh.

## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Sasaran Strategis Tahun 2024

**Gambar 2. Sasaran Strategis Tahun 2024**



### 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2024 disusun secara bertahap dan berkesinambungan. Rencana Kinerja SKIPM Aceh Tahun Anggaran 2024 diimplementasikan dalam Penetapan Target Kinerja Tahun 2024. Target kinerja SKIPM Aceh yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya dan dirinci ke dalam masing-masing indikator kinerja dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja Tahun 2024**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
<b>Kegiatan 1. Pengendalian Mutu</b>				
SK 1.1	Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif	1	Jumlah Sertifikat CPIB Suplier Yang Diterbitkan (Sertifikat)	5 Sertifikat
		2	Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik (Lokasi)	2 Lokasi
		3	Unit Penanganan Dan/Atau Pengolahan Ikan Yang Menerapkan Sistem Traceability (UPI)	5 UPI
		4	Ruang Lingkup Produk Yang Dijamin Melalui Sertifikasi Sistem HACCP (Produk )	30 Produk
		5	UPI Yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	15 SKHS UPI
<b>Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan</b>				
SK 2.1	Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif	6	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Di UPT UPT BPPMHKP Aceh (Nilai)	84
		7	Lokasi Usaha Perikanan Yang Menerapkan Quality Assurance Sesuai Standar Sistem Dan Regulasi Lingkup UPT BPPMHKP Aceh (Lokasi)	2 Lokasi
<b>Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP</b>				
SK 3.1	Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPPMHKP	8	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT BPPMHKP Aceh (Indeks)	84
		9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT BPPMHKP Aceh (Nilai)	82
		10	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT BPPMHKP Aceh (%)	100
		11	Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT BPPMHKP Aceh (%)	80 %
		12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT BPPMHKP Aceh	93,75
		13	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT BPPMHKP Aceh (Nilai)	82

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPPMHKP Aceh (%)	80 %
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPMHKP Aceh (%)	80 %
		16	Nilai Minimal Yang Diperkirakan Untuk Meraih Predikat WBK Lingkup BPPMHKP Aceh (Nilai)	75

Tabel 2. Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan III

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET / TAHUN	TARGET TW III / TAHUN 2024	CAPAIAN SD TW III/ TAHUN 2024
<b>Kegiatan 1. Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif</b>						
SK 01	Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif	1	Jumlah Sertifikat CPIB Suplier Yang Diterbitkan (Sertifikat)	5 Sertifikat	1	11
		2	Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik (Lokasi)	2 Lokasi	-	-
		3	Unit Penanganan Dan/Atau Pengolahan Ikan Yang Menerapkan Sistem Traceability (UPI)	5 UPI	2	2
		4	Ruang Lingkup Produk Yang Dijamin Melalui Sertifikasi Sistem HACCP (Produk )	30	1	28
		5	UPI Yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan (SKHS UPI)	15	1	15
<b>Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan</b>						
SK 02	Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan, Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif	6	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Di UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	84	84	91,94
		7	Lokasi Usaha Perikanan Yang Menerapkan Quality Assurance Sesuai Standar Sistem Dan Regulasi Lingkup UPT KIPM Aceh (Lokasi)	2 Lokasi	-	-
<b>Kegiatan 3. Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPPMHKP</b>						
SK 0.3	Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BKIPM	8	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT BPPMHKP Aceh (Indeks)	86	-	-
		9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT BPPMHKP Aceh (Nilai)	82	-	-
		10	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT BPPMHKP Aceh (%)	100 %	-	-
		11	Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT BPPMHKP Aceh (%)	80 %	80	94,87
		12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT BPPMHKP Aceh	93,75	-	-
		13	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT BPPMHKP Aceh (Nilai)	82	-	-

	14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPPMHKP Aceh (%)	80 %	-	-
	15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPMHKP Aceh (%)	80 %	-	-
	16	Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk Meraih Predikat WBK Lingkup Stasiun KIPM Aceh	75	-	-

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran kinerja, BKIPM telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan periode pelaporan, sedangkan kriteria yang digunakan dalam evaluasi kinerja pada laporan kinerja ini mengikuti pedoman pengelolaan kinerja pada aplikasi “kinerjaku” tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Angka maksimum tingkat capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU, sebagaimana berikut ini:

Warna	Keterangan
Merahmuda	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

4. IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan;
5. IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan;
6. IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IK melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IK stabilize mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

Akuntabilitas kinerja organisasi Badan karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh satuan kerja di lingkungan BKIPM. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja seluruh level lingkup BKIPM, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala setiap triwulan, dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id).

**Gambar 3. Sasaran Kinerja Tahun 2024 Dalam Aplikasi Kinerja**

No	Kode	Sasaran	Status	Aksi
1	S.01	Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional Dan Partisipatif	Digunakan	Lupa
2	S.02	Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Mutu Dari Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional Dan Partisipatif	Digunakan	Lupa
3	S.03	Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPPPSHKP	Digunakan	Lupa

(Sumber : Aplikasi Kinerjaku KKP, 2024)

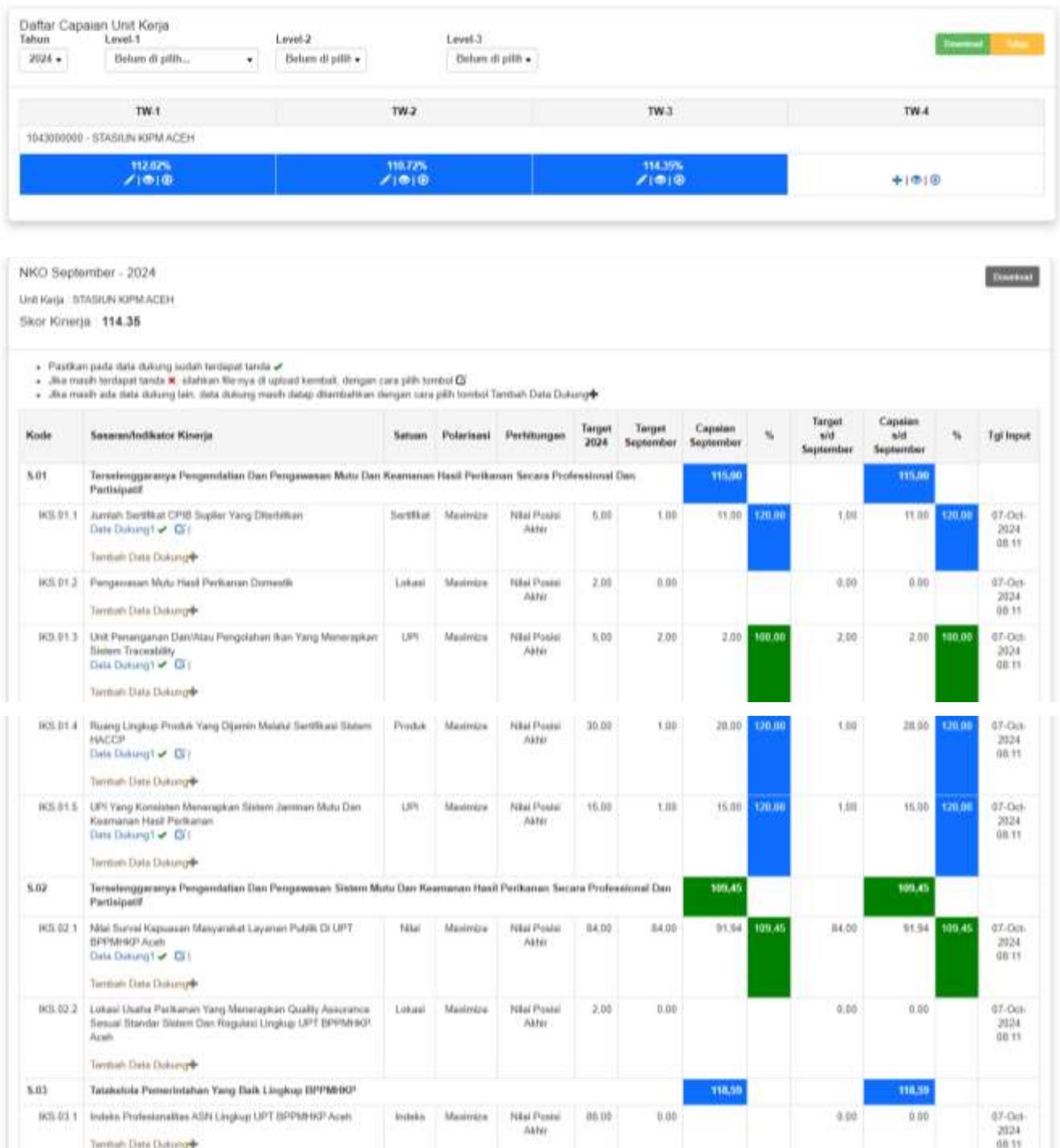
**Gambar 4. Tampilan Aplikasi Kinerja Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan III**



(Sumber : Aplikasi Kinerjaku KKP, 2024)

Sampai periode triwulan III tahun 2024, unit kerja SKIPM Aceh memperoleh nilai pengukuran skor kinerja (NKO) September sebesar 114,35. Nilai ini berdasarkan perhitungan secara otomatis yang terpotret melalui aplikasi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alamat portal <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Pada aplikasi ini secara sistematis menjelaskan uraian indikator sasaran, sasaran indikator kinerja beserta pengukuran dan penilaiannya. Capaian atas 16 indikator kinerja SKIPM Aceh yang menunjukkan capaian sasaran strategis secara ringkas disajikan pada gambar dibawah ini.

**Gambar 5. Capture Capaian Kinerja Dalam Aplikasi Kinerja Tahun 2024 Triwulan III**



KS.03.2	Nilai Penilaian Mandiri SAOP Lingkup UPT BPPMHP Aceh Tambah Data Dukung➕	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82.00	0.00			0.00	0.00	07-Oct-2024 08:11	
KS.03.3	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT BPPMHP Aceh Tambah Data Dukung➕	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100.00	0.00			0.00	0.00	07-Oct-2024 08:11	
KS.03.4	Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT BPPMHP Aceh Data Dukung! ✓  Tambah Data Dukung➕	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80.00	80.00	94.87	118.59	80.00	94.87	118.59	07-Oct-2024 08:11
KS.03.5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (KIPA) Lingkup UPT BPPMHP Aceh Tambah Data Dukung➕	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93.75	0.00			0.00	0.00	07-Oct-2024 08:11	
KS.03.6	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT BPPMHP Aceh Tambah Data Dukung➕	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82.00	0.00			0.00	0.00	07-Oct-2024 08:11	
KS.03.4	Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT BPPMHP Aceh Data Dukung! ✓  Tambah Data Dukung➕	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80.00	80.00	94.87	118.59	80.00	94.87	118.59	07-Oct-2024 08:11
KS.03.5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (KIPA) Lingkup UPT BPPMHP Aceh Tambah Data Dukung➕	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93.75	0.00			0.00	0.00	07-Oct-2024 08:11	
KS.03.6	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT BPPMHP Aceh Tambah Data Dukung➕	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82.00	0.00			0.00	0.00	07-Oct-2024 08:11	
KS.03.7	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKPM Lingkup BPPMHP Aceh Tambah Data Dukung➕	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80.00	0.00			0.00	0.00	07-Oct-2024 08:11	
KS.03.8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPMHP Aceh Tambah Data Dukung➕	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80.00	0.00			0.00	0.00	07-Oct-2024 08:11	
KS.03.9	Nilai Minimal Yang Diperkirakan Untuk Meraih Produk WDK Lingkup BPPMHP Aceh Tambah Data Dukung➕	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75.00	0.00			0.00	0.00	07-Oct-2024 08:11	
												

(Sumber : Aplikasi Kinerja KKP, 2024)

### 3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

#### Sararan 01 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan, Secara Profesional dan Partisipatif

Sasaran kegiatan yang kedua yang terdapat di dokumen kinerja SKIPM Aceh, adalah Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan, Secara Profesional dan Partisipatif yang secara hirarki berada di bawah koordinasi BPPMHKP. Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran kegiatan tersebut terdapat beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

#### 1. IKS. 02.1 Jumlah Sertifikat CPIB Supplier Yang Diterbitkan

Dalam rangka menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/PERMEN- KP/2019 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di supplier. Keputusan tersebut mengatur tentang persyaratan dari hulu ke hilir termasuk di dalamnya Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada unit pengumpul/supplier sebagai bukti komitmen otoritas kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan kewanaman hasil perikanan.

Untuk memastikan bahwa suatu unit pengumpul/supplier menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap sanitasi dan higiene penanganan ikan dengan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka otoritas kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi terhadap unit pengumpul/supplier.

Dalam memberikan jaminan tersebut maka diperlukan kegiatan inspeksi CPIB terhadap supplier sebagai pengendalian mutu dan keamanan (*Quality and Safety Assurance*) hasil perikanan yang diproduksi. Inspeksi CPIB terhadap unit pengumpul/supplier dilaksanakan berdasarkan konsepsi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Hasil dari kegiatan inspeksi CPIB pada unit pengumpul/supplier berupa sertifikat hasil inspeksi CPIB yang diterbitkan oleh kepala UPT.

**Tabel. 3**

**Target dan Realisasi IKS 01.1 Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan III**

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW III	Realisasi sd TW III	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Jumlah Sertifikat CPIB Supplier Yang Diterbitkan / Sertifikat	-	-	-	16	19	11	1	11	120	5	120	5	120

## 1. Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran capaian indikator kinerja Jumlah Sertifikat CPIB Supplier Yang Diterbitkan dilakukan secara triwulanan, sehingga sampai dengan pada periode triwulan III terdapat 11 sertifikat CPIB yang diterbitkan dengan klasifikasi “baik” sesuai dengan data sertifikat sebagai berikut :

**Tabel. 4**  
**Data Sertifikat CPIB Suplier Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan III**

NO	NOMOR SERTIFIKAT	UPT	TANGGAL TERBIT	UNIT SUPLIER	ALAMAT	PRODUK / KLASIFIKASI
1	No. 001/CPIB/41/II/2024	Aceh	01 Februari 2024	Abu Bakar	Komplek PPS Kutaraja, Gampong Lampulo, Kec, Kuta Alam, Kota Banda Aceh	Fresh Pelagic Fish / Baik
2	No. 004/CPIB/41/V/2024	Aceh	27 Mei 2024	Lautan Berjaya W Jay	Suka Maju, Kel. Suka Maju, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue, Aceh - Indonesia	Fresh Octipus / Baik
3	No. 005/CPIB/41/V/2024	Aceh	27 Mei 2024	Lautan Berjaya W Jay	Suka Maju, Kel. Suka Maju, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue, Aceh - Indonesia	Fresh Demersal Fish / Baik
4	No. 006/CPIB/41/V/2024	Aceh	27 Mei 2024	UKM Tiga Bersaudara	Jl. Pahlawan Desa Amaiteng Mulia Kec. Simeulue Timur kabupaten Simeulue, Aceh - Indonesia	Fresh Octopus / Baik
5	No. 007/CPIB/41/V/2024	Aceh	27 Mei 2024	UKM Tiga Bersaudara	Jl. Pahlawan Desa Amaiteng Mulia Kec. Simeulue Timur kabupaten Simeulue, Aceh - Indonesia	Fresh Demersal Fish / Baik
6	No. 008/CPIB/41/V/2024	Aceh	27 Mei 2024	UKM Tiga Bersaudara	Jl. Pahlawan Desa Amaiteng Mulia Kec. Simeulue Timur kabupaten Simeulue, Aceh - Indonesia	Fresh Pelagic Fish / Baik
7	No. 009/CPIB/41/V/2024	Aceh	27 Mei 2024	UKM Tiga Bersaudara	Jl. Pahlawan Desa Amaiteng Mulia Kec. Simeulue Timur kabupaten Simeulue, Aceh - Indonesia	Frozen Octopus / Baik
8	No. 010/CPIB/41/V/2024	Aceh	27 Mei 2024	UKM Tiga Bersaudara	Jl. Pahlawan Desa Amaiteng Mulia Kec. Simeulue Timur kabupaten Simeulue, Aceh - Indonesia	Frozen Demersal Fish / Baik
9	No. 011/CPIB/41/V/2024	Aceh	27 Mei 2024	UKM Tiga Bersaudara	Jl. Pahlawan Desa Amaiteng Mulia Kec. Simeulue Timur kabupaten Simeulue, Aceh - Indonesia	Frozen Demersal Fish / Baik
10	No. 012/CPIB/41/V/2024	Aceh	27 Mei 2024	UKM Tiga Bersaudara	Jl. Pahlawan Desa Amaiteng Mulia Kec. Simeulue Timur kabupaten Simeulue, Aceh - Indonesia	Dried Sea Cucumber / Baik
11	No. 015/CPIB/41/V/2024	Aceh	27 Mei 2024	Rahmadin Lawolo	Desa Sunabang, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue, Aceh - Indonesia	Fresh Octopus / Baik

## 2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data pada aplikasi kinerjajaku, capaian Indikator kinerja Jumlah Sertifikat CPIB Supplier Yang Diterbitkan pada periode yang sama pada tahun 2023 adalah sebanyak 4 sertifikat, sedangkan pada periode tahun 2024, diperoleh capaian sertifikat sampai dengan triwulan III dan sebanyak 11 sertifikat.

### 3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Perbandingan capaian Indikator kinerja Jumlah Sertifikat CPIB Supplier Yang Diterbitkan dengan target yang terdapat pada dokumen Renstra telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu dengan efektifitas pelaksanaan sebesar 120 %.

### 4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Upaya yang dilakukan oleh SKIPM Aceh dalam mencapai keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah dengan melakukan update pelaksanaan kegiatan secara berkala. Pada setiap bulannya pelaksanaan inspeksi penerapan CPIB di unit pengumpul/supplier tetap dilaksanakan dan dilaporkan secara berkala oleh inspektur mutu berdasarkan jadwal yang telah direncanakan. Pada masa transisi SOTK sekarang ini, diharapkan dengan kerja sama seluruh sumber daya yang ada dapat meminimalisir kegagalan pencapaian indikator kinerja.

### 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada kegiatan ini yaitu dengan melakukan efisiensi jumlah personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya serta dukungan personil non PNS yang berada di Kabupaten Simeulue sesuai dengan Unit Suplier. Serta terdapat rencana penggunaan teknologi atau media informasi untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

### 6. Realisasi Anggaran

Dari sisi anggaran, indikator kinerja Jumlah Sertifikat CPIB Supplier Yang Diterbitkan SKIPM Aceh Tahun 2024 didukung dengan pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 20.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.269.000,- Atau setara dengan 56,35 %.

### 7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung indikator kinerja Jumlah Sertifikat CPIB Supplier Yang Diterbitkan SKIPM Aceh adalah dengan melakukan sosialisasi regulasi atau peraturan terkait kepada pelaku usaha / Unit Suplier, melaksanakan program inspeksi CPIB yang telah direncanakan, koordinasi dan kerjasama antara petugas atau inspektur mutu dan/atau tim Pusat Mutu.

## 2. IKS. 02.2 Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik

Monitoring kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya tidak hanya merupakan salah satu upaya dalam mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan, tetapi juga sebagai upaya untuk menjawab tantangan global dimana tuntutan masyarakat terhadap bahan pangan yang aman dan bergizi semakin meningkat. Kegiatan monitoring kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya dilakukan di pelabuhan perikanan, pasar dan supplier/miniplant, ini sebagai upaya pencegahan sebelum bahan pangan sampai kepada konsumen sehingga ketahanan pangan dan keamanan pangan secara global dapat terwujud.

Pengambilan contoh produk perikanan yang diperdagangkan di pasar tradisional dan modern yang dilakukan oleh Inspektur Mutu bersama dengan pihak pengelola pasar tradisional dan pasar modern. Contoh tersebut selanjutnya akan dilakukan pengujian terhadap suhu, organoleptik, uji kimia dan mikrobiologi di laboratorium yang terakreditasi. Selain itu, dilakukan juga pengamatan kondisi sarana prasarana dari lokasi usaha yang menjadi objek pengawasan dan pengendalian yang bertujuan untuk menilai penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk konsumsi domestik.

### 1. Capaian Indikator Kinerja

Monitoring dan surveilen penjaminan mutu perikanan domestik terus dilaksanakan oleh SKIPM Aceh. Pada tahun 2024 dilakukan monitoring penjaminan mutu perikanan domestik dalam bentuk kegiatan "Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Sentra Penyedia Pangan Sehat di pasar domestik yang berlokasi di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Sentra penyedia pangan sehat yang menjadi lokus adalah pasar dan pelabuhan perikanan. Lokasi pelaksanaan implementasi Inpres Nomor 01 Tahun 2017 dengan lokasi pelaksanaan di Kota Banda Aceh dengan lokus Pasar Al-Mahirah dan TPI PPS Kutardja, sedangkan untuk Kabupaten Aceh Besar dengan lokus Pasar Induk Lambaro dan Pasar Keutapang. Kegiatan ini dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun atau dengan periode pelaporan pada tiap semester. Berikut target dan realisasi indikator kinerja beserta dokumentasi kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik SKIPM Aceh.

**Tabel. 5**

**Target dan Realisasi IKS 01.2 Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan III**

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target Triwulan III	Realisasi sd TW III	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik / Lokasi	-	1	2	2	2	-	-	2	100	2	100	2	100

## 2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan tabel data realisasi indikator kinerja ini serta data pada kinerja pada tahun 2023, periode yang sama, terdapat capaian yang sama, dimana terdapat 2 kabupaten/kota yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik.

## 3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Perbandingan capaian Indikator kinerja Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik dengan target yang terdapat pada dokumen Renstra telah sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu dengan efektifitas pelaksanaan sebesar 100 %.

## 4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum indikator kinerja Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik telah sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan. Terdapat hasil evaluasi yang mengharuskan SKIPM Aceh melakukan beberapa langkah perbaikan. Perlu peningkatan pemahaman terkait Keputusan Kepala BKIPM Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Juknis Pengendalian Mutu Dlm Rangka Penyediaan Pangan Sehat, sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. SKIPM Aceh berusaha dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dari indikator ini baik dari segi kualitas dan kuantitas dengan dukungan dari pihak-pihak terkait.

## 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada kegiatan ini yaitu dengan melibatkan personil tambahan non teknis dengan pengalaman yang cukup, serta dengan persiapan untuk memberikan penjelasan kepada seluruh personil.

## 6. Realisasi Anggaran

Dari sisi anggaran, indikator kinerja Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik Tahun 2024 didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.377.655,- atau setara dengan 52,76 %.

## 7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung indikator kinerja Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik adalah dengan peningkatan pemahaman terkait Keputusan Kepala BKIPM Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Juknis Pengendalian Mutu Dlm Rangka Penyediaan Pangan Sehat, koordinasi dan rapat evaluasi dan persiapan pelaksanaan periode selanjutnya.

### 3. IKS. 02.3 Unit Penanganan Dan/Atau Pengolahan Ikan Yang Menerapkan Sistem *Traceability*

Sistem *traceability* adalah sistem untuk menjamin kemampuan dalam menelusuri riwayat, aplikasi, atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi terhadap dokumen yang terkait. Penelusuran (pelacakan/ napak tilas) dari produk yang kita inginkan tersebut dengan melihat sejarah dari produk tersebut, dan bisa dilakukan dengan menelusurinya di setiap tahapan budidaya mulai dari sejak awal sampai akhir proses produksi dan bahkan juga menelusurinya setelah produk tersebut diedarkan sampai ke konsumen terakhir.

Ketertelusuran adalah kemampuan suatu sistem untuk mengenali dan menelusuri suatu produk pada setiap tahapan produksi, pengolahan maupun pemasaran. Untuk produk pangan, tujuan utama sistem ketertelusuran adalah untuk mencatat/mendokumentasikan produk mulai dari bahan baku sampai kepada konsumen. Sistem ketertelusuran sangat diperlukan guna menghasilkan produk-produk yang terjamin mutu dan keamanannya.

Keamanan pangan berdasarkan peraturan merupakan tanggung jawab pelaku usaha yang terlibat dalam rantai produksinya. Untuk perikanan, rantai produksi tersebut bisa sangat panjang dan melibatkan banyak pihak. Kesalahan penanganan ikan di atas kapal dapat menimbulkan potensi gangguan keamanan pangan, namun gangguan tersebut terjadi jauh di hilir ketika ikan tersebut dikonsumsi serta telah mengalami sejumlah penanganan dan pengolahan sepanjang rantai produksi dan distribusi yang melibatkan banyak pihak. Karena itu, manakala terjadi kasus keracunan akan dibutuhkan upaya ekstra untuk melacak penyebabnya.

SKIPM Aceh turut mendukung pelaksanaan penerapan sistem *traceability* lingkup UPT SKIPM Aceh, dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Pada prinsipnya, terdapat 2 aspek penting pada implementasi sistem ketertelusuran, yaitu *tracking* dan *tracing*, yang digunakan sebagai alat untuk menelusuri riwayat produksi suatu produk. Meskipun, implementasi sistem ketertelusuran pada produk perikanan di Aceh masih terbatas pada produk hasil industri maupun produk ekspor. Komitmen bersama antara pemerintah, pelaku usaha perikanan/produsen, dan konsumen sangat penting dalam membangun sistem ketertelusuran pada produk perikanan, termasuk pada unit usaha kecil dan menengah. Selanjutnya SKIPM Aceh terus berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dari indikator ini baik dari segi kualitas dan kuantitas dengan dukungan dari pihak-pihak terkait.

Mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM Nomor 170/Per-BKIPM/2019 tentang Penerapan Sistem *Traceability* (Ketelusuran) di UPI, terdapat ketentuan sebagai berikut :

- UPI harus menyusun dan menerapkan Sistem Ketelusuran yang mampu mengidentifikasi suatu produk dan keterkaitannya dengan asal bahan dan bagian-bagiannya, sejarah pengolahan, peredaran, dan lokasi produk setelah dikirim. Surat Keterangan Penerapan Sistem *Traceability* Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah menyusun program dan prosedur sistem ketelusuran dan telah menerapkannya.
- UPI telah membuktikan penerapan sistem *traceability* dengan simulasi penerapannya pada saat dilakukan evaluasi/inspeksi sistem *traceability*.
- UPI yang telah dinyatakan mampu telusur dari hasil inspeksi penerapan sistem *traceability* diberikan Surat Keterangan Penerapan Sistem *Traceability*. Surat keterangan berlaku 2 tahun sejak diterbitkan.

### 1. Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2024 indikator kinerja Unit Penanganan Dan/Atau Pengolahan Ikan Yang Menerapkan Sistem *Traceability* telah ditentukan target dan periodenya. Pada periode triwulan III, indikator kinerja ini memiliki target 2 UPI dan terdapat capaian sebesar 100 %. Berikut target dan realisasi indikator kinerja Unit Penanganan Dan/Atau Pengolahan Ikan Yang Menerapkan Sistem *Traceability*.

**Tabel. 6**  
**Target dan Realisasi IKS 01.3 Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan III**

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Unit Penanganan Dan/Atau Pengolahan Ikan Yang Menerapkan Sistem <i>Traceability</i> / UPI	-	1	2	3	2	-	2	2	100	5	40	5	40

### 2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data kinerja SKIPM Aceh pada periode tahun 2023, triwulan III terdapat target dan capaian indikator kinerja Unit Penanganan Dan/Atau Pengolahan Ikan Yang Menerapkan Sistem *Traceability* dengan realisasi sebesar 2 UPI.

### 3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Perbandingan capaian indikator kinerja Unit Penanganan Dan/Atau Pengolahan Ikan Yang Menerapkan Sistem *Traceability* tercapai sebanyak 40 %.

#### 4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Sesuai dengan target kegiatan Penerapan Sistem *Traceability* tahun 2024, SKIPM Aceh memiliki target pada periode bulan Juli dan Oktober, sehingga sampai dengan akhir periode triwulan III tercapai sebesar 100 %.

#### 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada kegiatan ini yaitu dengan melakukan efisiensi jumlah personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Serta terdapat rencana penggunaan teknologi atau media informasi untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Baik untuk pengembangan dan penerapan *traceability* maupun monitoring dan evaluasi.

#### 6. Realisasi Anggaran

Indikator kinerja Unit Penanganan Dan/Atau Pengolahan Ikan Yang Menerapkan Sistem *Traceability* didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.000.000, yang terdapat pada kegiatan pengembangan dan penerapan *traceability* maupun monitoring dan evaluasi.

#### 7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja Penerapan Sistem *Traceability*, adalah dengan melakukan inventarisasi dan menyusun jadwal kegiatan *traceability*; meningkatkan kompetensi SDM; serta melakukan sosialisasi internal dan eksternal ke pengguna jasa dan *stakeholder* terkait.

**Gambar. 6**  
**Capture Sertifikat *Traceability* di Provinsi Aceh Tahun 2024**



#### 4. IKS. 02.4 Ruang Lingkup Produk Yang Dijamin Melalui Sertifikasi Sistem HACCP

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (*end product testing*).

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanan. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011. Sebelum sertifikat HACCP diterbitkan oleh BKIPM, sebelumnya diterbitkan rekomendasi dalam bentuk laporan singkat inspeksi oleh SKIPM Aceh per ruang lingkup produk perikanan.

Sertifikat HACCP yang diterbitkan berdasarkan jenis olahan, jenis proses berdasarkan potensi bahaya (*hazard*). Tahapan permohonan sertifikat penerapan HACCP adalah sebagai berikut:

- UPI mengajukan permohonan
- Dilakukan audit kecukupan oleh Pusat SM
- Inspeksi oleh inspektur mutu
- UPI melakukan tindakan perbaikan
- Evaluasi dan verifikasi tindakan perbaikan
- Penerbitan sertifikat HACCP Perpanjangan sertifikat penerapan HACCP:
- Verifikasi dan survailen konsistensi penerapan HACCP di UPI
- Penerbitan sertifikat HACCP

Indikator kinerja ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP diukur dengan menghitung jumlah realisasi rekomendasi produk penerbitan PMMT/HACCP yang diterbitkan, dengan formula sebagai berikut :

$$\sum \text{Ruang Lingkup HACCP} = \text{HACCP Perpanjangan} + \text{HACCP Baru}$$

## 1. Capaian Indikator Kinerja

Tabel. 7

Target dan Realisasi IKS 01.4 Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan III

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW III	Realisasi sd TW III	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Ruang Lingkup Produk Yang Dijamin Melalui Sertifikasi Sistem HACCP / Produk	-	-	23	35	39	11	1	28	120	30	93,34	30	93,34

Sampai dengan periode triwulan III tahun 2024, rekomendasi HACCP yang diterbitkan di SKIPM Aceh sebanyak 28 produk dari total target tahunan sejumlah 30 rekomendasi pada tahun 2024, yang terdiri dari penerbitan baru dan monev sebagaimana data capaian ruang lingkup HACCP adalah termasuk kegiatan inspeksi dan monev HACCP sebagaimana terlampir.

## 2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Sesuai dengan data kinerja, capaian indikator kinerja Ruang Lingkup Produk Yang Dijamin Melalui Sertifikasi Sistem HACCP pada tahun 2023 periode triwulan III adalah sebanyak 35 produk. Jika diperbandingkan dengan capaian pada tahun 2024 terdapat penurunan jumlah produk dikarenakan terdapat beberapa UPI yang sedang dalam proses pembaharuan masa berlaku dokumen HACCP.

## 3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Perbandingan capaian Indikator kinerja Ruang Lingkup Produk Yang Dijamin Melalui Sertifikasi Sistem HACCP dengan target yang terdapat pada dokumen Renstra telah diupayakan sebaik baiknya sesuai dengan target yang ditetapkan, serta diharapkan efektifitas pelaksanaan akan lebih dari 100 %.

## 4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum Indikator kinerja Ruang Lingkup Produk Yang Dijamin Melalui Sertifikasi Sistem HACCP telah melebihi target yang ditetapkan pada periode triwulan. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja diharapkan dapat terwujud dengan penerapan rencana aksi dan dukungan pihak-pihak terkait.

Tabel. 8

**Data Ruang Lingkup Produk Yang Dijamin Melalui Sertifikasi Sistem HACCP (Produk)  
Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan III**

NO	NOMOR SERTIFIKAT HACCP	RUANG LINGKUP	TANGGAL	BERLAKU SAMPAI	GRADE SERTIFIKAT	STATUS	NO	NAMA UPI	ALAMAT
1	086/PM/HACCP/PS/03/23	Fresh Cephalopods	16 Februari 2024		B	Monev	1	CV. King Of Milk Fish	Desa Raja, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang, Aceh-Indonesia
2	116/PM/HACCP/PS/02/23	Fresh Demersal Fish	16 Februari 2024		B	Monev			
3	083/PM/HACCP/PS/03/23	Fresh Pelagic Fish	16 Februari 2024		B	Monev			
4	084/PM/HACCP/PS/03/23	Fresh Shrimp	16 Februari 2024		B	Monev			
5	085/PM/HACCP/PS/03/23	Fresh Swimming Crab	16 Februari 2024		B	Monev			
6	087/PM/HACCP/PB/03/23	Frozen Cephalopods	16 Februari 2024		B	Monev			
7	117/PM/HACCP/PB/02/23	Frozen Demersal Fish	16 Februari 2024		B	Monev			
8	118/PM/HACCP/PB/02/23	Frozen Milkfish	16 Februari 2024		B	Monev			
9	119/PM/HACCP/PB/02/23	Frozen Pelagic Fish	16 Februari 2024		B	Monev			
10	130/PM/HACCP/PB/02/23	Frozen Shrimp	16 Februari 2024		B	Monev			
11	131/PM/HACCP/PB/02/23	Frozen Soft Shell Crab	16 Februari 2024		B	Monev			
12	340/PM/HACCP/PS/04/23	Fresh Pelagic Fish	02 April 2024		C	Monev	2	CV. Fishenary Indo Makmur	Jl. Sisingamaraja No. 16 Ujung, Kel. Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh - Indonesia
13	341/PM/HACCP/PB/04/23	Frozen Pelagic Fish	02 April 2024		C	Monev			
14	342/PM/HACCP/PB/04/23	Frozen Shrimp	02 April 2024		C	Monev			
15	347/PM/HACCP/PS/04/23	Fresh Demersal Fish	02 April 2024		C	Monev			
16	348/PM/HACCP/PB/04/23	Frozen Demersal Fish	02 April 2024		C	Monev			
17	008/PM/HACCP/PS/05/24	Fresh Demersal Fish	03 Mei 2024	03 Mei 2026	B	Terbit Baru	3	PT. Perikanan Indonesia - Simeulue	Jl. Letkol Ali Hasan TPI, Simeulue, Aceh - Indonesia
18	015/PM/HACCP/PS/05/24	Fresh Pelagic Fish	03 Mei 2024	03 Mei 2026	B	Terbit Baru			
19	009/PM/HACCP/PB/05/24	Frozen Cephalopods	03 Mei 2024	03 Mei 2026	B	Terbit Baru			
20	010/PM/HACCP/PB/05/24	Frozen Demersal Fish	03 Mei 2024	03 Mei 2026	B	Terbit Baru			
21	016/PM/HACCP/PB/05/24	Frozen Pelagic Fish	03 Mei 2024	03 Mei 2026	B	Terbit Baru			
22	046/PM/HACCP/PS/07/24	Fresh Demersal Fish	18 Juli 2024	18 Juli 2026	B	Terbit Baru	4	CV. Kana Cahaya Bahari	Jl. Pinggir Kali Nomor 02, Kel. Punge Blang Cut, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Aceh - Indonesia
23	047/PM/HACCP/PS/07/24	Frozen Demersal Fish	18 Juli 2024	18 Juli 2026	B	Terbit Baru			
24	048/PM/HACCP/PS/07/24	Frozen Lobster	18 Juli 2024	18 Juli 2026	B	Terbit Baru			
25	079/PM/HACCP/PS/07/24	Fresh Pelagic Fish	22 Juli 2024	22 Juli 2026	C	Terbit Baru			
26	080/PM/HACCP/PS/07/24	Fresh Tuna	22 Juli 2024	22 Juli 2026	C	Terbit Baru			
27	081/PM/HACCP/PS/07/24	Frozen Pelagic Fish	22 Juli 2024	22 Juli 2026	C	Terbit Baru			
28	082/PM/HACCP/PS/07/24	Frozen Tuna	22 Juli 2024	22 Juli 2026	C	Terbit Baru			

## 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan indikator kinerja Ruang Lingkup Produk Yang Dijamin Melalui Sertifikasi Sistem HACCP, berupa efisiensi jumlah personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Serta terdapat penggunaan teknologi atau media informasi untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan, baik pada kegiatan inspeksi dan verifikasi maupun monitoring dan evaluasi.

## 6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran, indikator kinerja Ruang Lingkup Produk Yang Dijamin Melalui Sertifikasi Sistem HACCP didukung dengan kegiatan Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) Ruang Lingkup Produk pada UPI melalui anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 22.974.000,- atau senilai 76,58 %.

## 7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung indikator kinerja Ruang Lingkup Produk Yang Dijamin Melalui Sertifikasi Sistem HACCP diantaranya yaitu : melakukan inventarisasi masa berlaku HACCP semua UPI; membuat program terkait *schedule* perpanjangan sertifikat HACCP; melakukan update data-data terkait; meningkatkan kapasitas SDM; serta meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak UPI. Berikut data target dan realisasi indikator kinerja ini.

**Gambar. 7**

### **Kegiatan Inspeksi Penerapan HACCP di UPI Tahun 2024 Triwulan III**



## 5. IKS. 02.5 UPI Yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan

Unit Pengolahan Ikan (UPI) merupakan unit usaha di bidang penanganan dan atau pengolahan ikan yang telah bersertifikat HACCP dan mempunyai nomor registrasi dari Otoritas Kompeten. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah. 1) Persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan meliputi : a. persyaratan dasar; b. penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi HACCP; dan c. penerapan sistem ketelusuran. Indikator kinerja ini dihitung sesuai dengan jumlah SKHS (Surat Keterangan Hasil Surveillance) yang diterbitkan untuk UPI yang menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

### 1. Capaian Indikator Kinerja

**Tabel. 9**

**Target dan Realisasi IKS 01.5 Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan III**

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW III	Realisasi sd TW III	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	UPI Yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan (SKHS UPI)	-	10	11	12	21	6	1	15	120	15	100	15	100

Pada tahun 2024 indikator kinerja UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan ditargetkan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan pertimbangan untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dapat secara detail menggambarkan penerapan pelaksanaan sistem HACCP dalam waktu tahun berjalan melalui kegiatan inspeksi, monitoring dan surveilan secara lengkap berdasarkan jadwal atau rencana kerja yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja Berdasarkan data HACCP Online sampai dengan akhir periode tahun 2024 triwulan III terdapat capaian sebanyak 15 SKHS UPI dari target 1, sebagai

bukti penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan status sertifikat HACCP masih berlaku yang menjadi persyaratan untuk UPI melaksanakan kegiatan ekspor dari Provinsi Aceh.

## 2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2023 periode triwulan III, indikator kinerja UPI Yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan adalah sebanyak 5 SKHS UPI dari target 5 atau setara dengan 100 %. Capaian ini lebih banyak dibandingkan periode tahun 2024 triwulan III. Hal ini dimungkinkan karena beberapa UPI telah habis masa berlaku dokumen HACCP dan atau sedang dalam masa perpanjangan, sehingga belum dapat dilakukan monitoring dan surveilan penerapan HACCP.

## 3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan dokumen Renstra capaian dari indikator kinerja UPI Yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan telah diupayakan secara maksimal agar dapat tercapai atau melebihi target pada periode tahunan.

## 4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum capaian dari indikator kinerja UPI Yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan telah melebihi target yang ditetapkan pada periode triwulan. Diharapkan keberhasilan pada periode perhitungan secara tahunan dapat tercapai.

## 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada upaya pencapaian indikator kinerja UPI Yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan dalam bentuk efisiensi penggunaan berupa efisiensi jumlah personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Serta terdapat penggunaan teknologi atau media informasi untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan

## 6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran tahun 2024, indikator kinerja UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan didukung dengan kegiatan Surveillance ke UPI dalam Rangka *Official Control* yang memiliki anggaran sebesar Rp. 76.000.000,- dengan nilai serapan sebesar Rp. 65.341.206,- atau setara dengan 81,68 % dari pagu anggaran.

## 7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan dalam rangka mendukung indikator kinerja UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan antara lain : pelaksanaan program dan rencana kegiatan; melakukan sosialisasi terkait regulasi atau peraturan kepada pelaku usaha atau UPI; serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara petugas inspektur mutu lingkup internal maupun dengan pusat.

### **Sasaran 03 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan, Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan, Secara Profesional dan Partisipatif**

Sasaran kegiatan yang ketiga yang terdapat di dokumen kinerja SKIPM Aceh, adalah Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan, Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan, Secara Profesional dan Partisipatif. Sasaran kegiatan ini secara hirarki berada dibawah koordinasi Pusat Standarisasi Sistem dan Kepatuhan – BKIPM. Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran kegiatan tersebut terdapat beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

#### **6. IKS. 03.1 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik**

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Selain itu, data SKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. SKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Kep/14/M.PAN/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

##### **1. Capaian Indikator Kinerja**

Pada periode triwulan III tahun 2024 ini, SKIPM Aceh melakukan kembali pengukuran survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, yaitu pelaksanaan kegiatan pada bulan Juli sampai dengan akhir bulan September atau triwulan III tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan merekap/mendata responden SKIPM Aceh sebanyak 10 (sepuluh) responden yang mengisi kuesioner secara online dan terintegrasi pada link [www.ptsp.kkp.go.id](http://www.ptsp.kkp.go.id).

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas unsur pelayanan SKIPM Aceh, diperoleh hasil skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 91,94. Nilai capaian yang dianggap menggambarkan bahwa kinerja unit pelayanan ini dalam memberikan layanan yang dibutuhkan masyarakat masuk dalam kategori kinerja pelayanan “Sangat Baik”. Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan, secara umum kualitas pelayanan pada SKIPM Aceh dipersepsikan baik oleh masyarakat pengguna jasa.

**Gambar. 8**

**Capture Portal Penilaian Hasil SKM Tahun 2024 Triwulan III**

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Jml Responden
bkipm	Stasiun KIPM Aceh	2024	3	4.80	91.94	10

Showing 1 to 1 of 1 entries

[Download Data](#)

**Tabel. 10**

**Target dan Realisasi IKS 02.1 Tahun 2024 Triwulan III**

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Di UPT Stasiun KIPM Aceh / Nilai	-	-	90,60	87,58	91,67	90,62	84	91,94	109,45	84	109,45	84	109,45

## 2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data capaian indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Di UPT Stasiun KIPM Aceh pada tahun 2023 periode triwulan III adalah sebesar 88,00. Jika dibandingkan dengan periode tahun 2024 triwulan III terdapat peningkatan capaian nilai survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Nilai tersebut telah tercapai melebihi target pada periode triwulan III atau setara dengan 109,45 %.

## 3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan data pada dokumen Renstra capaian indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Di UPT Stasiun KIPM Aceh telah melebihi target yang ditetapkan.

## 4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum capaian indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Di UPT Stasiun KIPM Aceh telah melebihi target yang ditetapkan. Analisa lebih lanjut telah diupayakan untuk menghindari terjadinya kesalahan input data pada pengisian oleh responden. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat peningkatan pada nilai keseluruhan unsur pelayanan yang menjadi unsur survei kepuasan masyarakat dibandingkan capaian periode sebelumnya. *Human error* dimungkinkan dapat terjadi sebagai keputusan atau perilaku responden yang tidak tepat yang mengurangi atau berpotensi mengurangi efektivitas, keselamatan atau performa sistem yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi performa instansi. Hal ini menjadi informasi penting agar SKIPM Aceh untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanannya, serta meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait salah satunya dengan BKI Aceh, karena sampai dengan saat ini secara sistem dan proses masih terkait dengan kegiatan pelayanan karantina ikan. Koordinasi harus terus ditingkatkan agar pengguna jasa layanan mendapatkan pelayanan lebih baik di masa yang akan datang.

## 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung capaian indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik, karena dalam implementasinya indikator ini melibatkan dukungan dari seluruh kegiatan bidang teknis pada pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan.

## 6. Realisasi Anggaran

Dari sisi anggaran indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Di UPT Stasiun KIPM Aceh tahun 2024 didukung melalui kegiatan nilai survey kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap layanan. Sampai dengan akhir periode triwulan III atau bulan September pagu anggaran di bawah bidang Standarisasi dan Sistem Kepatuhan secara sistem masih mengalami pemblokiran anggaran.

## 7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Di UPT Stasiun KIPM Aceh tahun 2024 adalah dengan melakukan pengembangan pelayanan publik untuk memudahkan pengguna layanan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut yang telah ditempuh sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan. Selain itu direncanakan akan dilaksanakan sosialisasi budaya pelayanan prima yang diikuti oleh seluruh pegawai dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya.

## 7. IKS. 03.4 Lokasi Usaha Yang Menerapkan *Quality Assurance* Sesuai Standar Sistem dan Regulasi Lingkup UPT KIPM Aceh

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah upaya yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk memperoleh hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Otoritas Kompeten adalah unit organisasi di lingkungan kementerian yang diberi mandat oleh Menteri untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Pengendalian adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Otoritas Kompeten untuk melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara penerapan sistem mutu oleh pelaku usaha dengan peraturan/ketentuan dalam rangka memberi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

### 1. Capaian Indikator Kinerja

**Tabel. 11**

**Target dan Realisasi IKS 02.2 Tahun 2024 Triwulan III**

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Lokasi Usaha Perikanan Yang Menerapkan <i>Quality Assurance</i> Sesuai Standar Sistem Dan Regulasi Lingkup UPT KIPM Aceh / Lokasi	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-

Pada tahun 2024 target indikator kinerja Lokasi Usaha Perikanan Yang Menerapkan *Quality Assurance* Sesuai Standar Sistem Dan Regulasi Lingkup UPT BPPMHKP Aceh Tahun 2024 sebanyak 2 lokasi yaitu di Lokasi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap. Pada triwulan III tidak terdapat target dan realisasi indikator ini.

## 2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data indikator kinerja Lokasi Usaha Perikanan Yang Menerapkan *Quality Assurance* Sesuai Standar Sistem Dan Regulasi tahun 2023 triwulan III, tidak terdapat capaian. Hal ini sama dengan data kinerja pada tahun 2024 triwulan III, karena indikator kinerja ini memiliki periode perhitungan pada akhir tahun.

## 3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan dokumen Renstra, data indikator kinerja Lokasi Usaha Perikanan Yang Menerapkan *Quality Assurance* Sesuai Standar Sistem Dan Regulasi belum dapat dilakukan. Hal ini karena karena indikator kinerja ini memiliki periode perhitungan pada akhir tahun.

## 4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Sampai dengan periode triwulan III tahun 2024 SKIPM Aceh telah berupaya mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Lokasi Usaha Perikanan Yang Menerapkan *Quality Assurance* Sesuai Standar Sistem Dan Regulasi. Selain itu secara intensif melakukan koordinasi terkait pembukaan blokir anggaran dan perubahan SOTK.

## 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Hingga saat ini belum dapat dilakukan analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya secara detail. Hal ini salah satunya karena periode perhitungan indikator kinerja ini dilaksanakan pada akhir tahun. Selain itu karena masih terdapat blokir anggaran pada pagu anggaran yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini.

## 6. Realisasi Anggaran

Indikator kinerja Lokasi Usaha Perikanan Yang Menerapkan *Quality Assurance* Sesuai Standar Sistem Dan Regulasi pada tahun 2024, memiliki dukungan pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 99.000.000,-. Saat ini masih terdapat blokir anggaran pagu kegiatan pada komponen Verifikasi Penerapan Standar *Quality Assurance* pada proses produksi perikanan.

## 7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan indikator kinerja Lokasi Usaha Perikanan Yang Menerapkan *Quality Assurance* Sesuai Standar Sistem Dan Regulasi Lingkup UPT KIPM Aceh adalah dengan melakukan *update* data yang diperoleh pada tahun 2023 serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang menjadi pelaksana kegiatan serta meningkatkan koordinasi dengan pusat dan *stakeholder* terkait.

## Sasaran 04 : Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BKIPM

Sasaran kegiatan yang keempat yang terdapat di dokumen kinerja SKIPM Aceh, adalah Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BKIPM. Sasaran kegiatan ini secara hirarki berada dibawah koordinasi Sekerataria BKIPM. Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran kegiatan tersebut terdapat beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

### 8. IKS. 03.1 Indeks Profesionalitas ASN

Profesionalisme pegawai dalam sebuah organisasi sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan yang tercemin melalui perilaku sehari-hari. Kemampuan menunjukkan potensi dalam melaksanakan tugas yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan. Sedangkan profesional dalam pendekatan sistem merit mengandung persyaratan kompetensi (pengetahuan, keahlian, pengalaman), kualifikasi (pendidikan, pelatihan), kinerja (target, pencapaian), kompensasi (kebutuhan, external equity), dan disiplin. Berdasarkan hal tersebut, maka indikator yang digunakan untuk mengukur indek profesionalitas ASN adalah kompetensi, kinerja, kompensasi, dan disiplin, dengan rumus matematis melalui sistem yang telah ditentukan.

Sesuai dengan peraturan Kementerian PAN-RB di bagian Pedoman Pengukuran IP-ASN, berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019, tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

#### 1. Capaian Indikator Kinerja

**Tabel 12.**

**Target dan Realisasi IKS 03.1 Tahun 2024 Triwulan III**

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024					Renstra 2020-2024		
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Aceh / Indeks	-	81,57	82,36	83,45	89,89	90,34	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan data pada [ropeg.kkp.go.id](http://ropeg.kkp.go.id) tahun 2024, target dari indikator kinerja IP ASN BPPMHKP / SKIPM Aceh mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi sebesar 86, serta dengan target periode semester I tahun 2024 sebesar 81. Dalam periode triwulan III tidak dilakukan perhitungan capaian realisasi. Capaian nilai tersebut dicapai atas kerjasama seluruh pegawai SKIPM Aceh yang mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat terkait kompetensi yang dapat meningkatkan profesionalitas kinerja.

## 2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2023 triwulan III tidak dilakukan perhitungan capaian.

## 3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan dokumen Renstra, indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN memiliki target yang harus dicapai sebesar 86 pada akhir tahun. Sampai dengan triwulan III telah terdapat upaya peningkatan capaian yang dilakukan oleh seluruh pegawai SKIPM Aceh.

## 4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN menjadi salah satu indikator kinerja utama yang terus mendapat perhatian dari seluruh pegawai. Selain itu Kepala SKIPM Aceh berkomitmen untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai untuk dapat meningkatkan kompetensi untuk mendukung kinerjanya.

## 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada upaya pencapaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN. Seluruh pegawai memanfaatkan adanya teknologi informasi untuk mengikuti seminar, pelatihan dan bimbingan teknis terkait secara *daring*. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh BPPMHKP, Unit eselon lain, e-milea KKP maupun penyelenggara eksternal lainnya.

## 6. Realisasi Anggaran

Dari sisi anggaran indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN tidak secara khusus dialokasikan. Terdapat pagu anggaran dukungan manajemen internal dari kegiatan Layanan Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan SDMA sebesar Rp. 7.753.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.7.753.000,- atau besarnya setara dengan 100 %.

## 7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun KIPM Aceh adalah dengan melakukan konsolidasi internal lingkup SKIPM Aceh serta melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan serta melakukan monitoring evaluasi secara periodik terhadap data IP ASN seluruh pegawai. Selanjutnya secara mandiri setiap pegawai PNS melakukan input data pada portal BKN dan selanjutnya dilakukan verifikasi oleh operator yang telah ditunjuk. Hal ini akan terus dilakukan pada periode selanjutnya.

## 9. IKS. 03.2 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP SKIPM / BPPMHKP Aceh dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni : perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (25%). Penilaian evaluasi AKIP dilakukan menggunakan LHE yang terdapat pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu aplikasi Kinerjaku KKP. Selain itu terdapat portal <https://esr.menpan.go.id/> yang menjadi sarana setiap unit kerja melakukan kewajiban pemenuhan dokumen kinerja dengan melakukan unggah dokumen-dokumen kinerja sehingga dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

## 1. Capaian Indikator Kinerja

**Tabel. 13**  
**Target dan Realisasi IKS 03.2 Tahun 2024 Triwulan III**

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT BPPMHKP Aceh / Nilai	-	-	87,40	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-

Berdasarkan data pada tabel diatas, Indikator kinerja nilai penilaian mandiri SAKIP pada periode triwulan III tidak terdapat target dan capaian. Hal ini karena indikator kinerja ini belum dapat dilakukan perhitungan atau dihitung dengan periode tahunan dan menggunakan jenis atau pola perhitungan target atau realisasi data nilai posisi akhir. Pada saat ini telah dilakukan penilaian secara mandiri oleh Sekeretariat BPPMHKP bersama dengan Tim Penilai Internal lingkup KKP dan secara resmi akan diinformasikan pada periode akhir tahun.

## 2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data kinerja tahun 2023 tidak terdapat target indikator kinerja penilaian mandiri SAKIP sehingga secara pencapaian indikator kinerja ini tidak dapat secara langsung diperbandingkan. Namun terdapat indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja yang secara sistem melakukan evaluasi atau penilaian terhadap dokumen-dokumen kinerja seluruh unit kerja lingkup BKIPM.

## 3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Target Penilaian Mandiri SAKIP merupakan indikator kinerja yang tidak setiap tahun masuk dalam dokumen kinerja. Penilaian mandiri SAKIP telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup BKIPM pada tahun 2021. Terdapat unit kerja yang menjadi *sampel* uji petik penilaian SAKIP secara langsung yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal lingkup KKP.

#### 4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Analisa keberhasilan pencapaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP adalah didukung oleh keterlibatan pimpinan dalam setiap unsur AKIP, pemenuhan dokumen, peningkatan kualitas dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja internal. Diperlukan peningkatan sumber daya pengelola kinerja baik melalui diklat atau bimbingan teknis baik secara langsung maupun online secara periodik.

#### 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya, dimana dalam pencapaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP dilaksanakan oleh tim yang telah ditunjuk. Selain itu terdapat efisiensi lainnya, karena indikator kinerja ini secara khusus tidak didukung dengan anggaran yang khusus terkait SAKIP, namun dapat dikategorikan masuk komponen dukungan manajemen internal pada kegiatan perencanaan dan penganggaran.

#### 6. Realisasi Anggaran

Pada sisi anggaran terkait perencanaan dan penganggaran terpadat pagu anggaran sebesar Rp. 29.014.000,- dengan realisasi sampai dengan triwulan III tercapai secara keseluruhan.

#### 7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Sesuai dengan nota dinas Sekretaris Jenderal KKP Nomor 1543/SJ.1/RC.610/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 perihal permintaan kelengkapan data sakip melalui aplikasi ESR (E Sakip Review) Tahun 2024, telah dilakukan upaya pemenuhan kelengkapan data dokumen dan informasi yang memadai yang menggambarkan kondisi SKIPM Aceh melalui [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id), diantaranya yaitu:

- a. Rencana Strategis (Renstra);
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang Sudah Ditandatangani;
- d. Laporan Kinerja Tahun 2023;
- e. Rencana Aksi Tahun 2024 Beserta Laporan Monev Triwulan I Tahun 2024;
- f. Pohon Kinerja / *Cascading* Kinerja;
- g. Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal;
- h. Pedoman Teknis Perencanaan; Pengukuran dan Internal AKIP;
- i. Matrik Tindak Lanjut LHE AKIP Tahun 2023.

Rencana aksi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja ini adalah dengan melakukan konsolidasi internal serta melakukan penyusunan dan pengumpulan dokumen akuntabilitas kinerja sesuai dengan ketentuan sehingga dapat digunakan sebagai data pendukung penilaian SAKIP SKIPM Aceh.

## 10. IKS. 03.3 Persentase Penyelesaian Temuan BPK

Berdasarkan amanat pasal 23 ayat (5) UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo Pasal 6 ayat (3) UU BPK Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Indikator kinerja Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK mempunyai definisi nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

### 1. Capaian Indikator Kinerja

**Tabel. 14**  
**Target dan Realisasi IKS 03.3 Tahun 2024 Triwulan III**

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPPMHKP Aceh / Persen.	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-

Pada tahun 2024, indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK mempunyai target sebesar 100 %. Pada periode triwulan III tidak ada target dan capaian indikator ini, karena berdasarkan manual indikator kinerja dilakukan pada periode akhir tahun 2024.

## 2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Pada tahun 2023 triwulan III tidak terdapat capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK. Capaian ini sama dengan periode triwulan III tahun 2024, hal ini dikarenakan indikator kinerja ini dilakukan pada periode akhir tahun.

## 3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan dokumen Renstra terbaru indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK belum dapat diperbandingkan secara langsung, karena indikator kinerja ini dilakukan pada periode akhir tahun.

## 4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya, dimana dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK dilaksanakan oleh tim yang telah ditunjuk. Selain itu terdapat efisiensi lainnya, karena indikator kinerja ini secara khusus tidak didukung dengan anggaran yang khusus terkait temuan BPK, namun dapat dikategorikan masuk komponen dukungan manajemen internal pada kegiatan pemantauan dan evaluasi.

## 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya, dimana dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK dilaksanakan oleh tim yang telah ditunjuk.

## 6. Realisasi Anggaran

Pada sisi anggaran indikator kinerja ini dapat dikategorikan masuk pada anggaran gabungan di dukungan manajemen internal, yaitu komponen pemantauan dan evaluasi. Terdapat pagu anggaran sebesar Rp. 47.072.000,- dengan realisasi sampai dengan triwulan III sebesar Rp. 32.735.696,- atau setara dengan 69,54 %.

## 7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK adalah dengan melakukan pemenuhan seluruh dokumen atau laporan keuangan sesuai dengan ketentuan, serta meningkatkan koordinasi internal dan eksternal.

## 11. IKS. 03.4 Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja

Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan. Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis 1 dan 2 dalam *Three Lines of Defense* sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya.

Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja, dihitung dengan periode triwulanan dan menggunakan jenis atau pola perhitungan target atau realisasi data nilai posisi akhir. Indikator ini diperoleh berdasarkan data aplikasi SIDAK KKP.

### 1. Capaian Indikator Kinerja

**Tabel. 15**  
**Target dan Realisasi IKS 03.4 Tahun 2024 Triwulan III**

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja BPPMHKP Aceh / %	-	-	100	100	100	100	80	94,87	118,59	80	118,59	80	118,59

Pada tahun 2024 SKIPM Aceh menjadi salah satu lokasi pengawasan audit kinerja oleh Inspektorat Jenderal KKP. Berdasarkan audit kinerja tersebut, SKIPM Aceh telah berupaya menindaklanjuti hasil temuan audit kinerja. Sampai dengan akhir triwulan III, sebagian besar temuan dari pengawasan yang dilaksanakan telah selesai ditindaklanjuti. Berdasarkan data tersebut, capaian nilai TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan), indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja adalah berstatus "SUKSES" dengan capaian sebesar 94,87 % dari target sebesar 80 %, atau setara dengan 118,59 %. Data tersebut bisa dilihat dari tampilan pada *dash board* aplikasi SIDAK (<http://sidak.kkp.go.id/login>) yang menjelaskan tindak lanjut hasil pengawasan telah terpenuhi sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan. Tampilan tangkap layar aplikasi SIDAK triwulan III ditampilkan sebagai berikut.

**Gambar. 9**  
**Capture Aplikasi Sidak KKP Tahun 2024 Triwulan III**



## 2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja tahun 2023 triwulan III, SKIPM Aceh memiliki capaian kinerja sebesar 100 % dari target sebesar 75 %. Jika dilakukan perbandingan dengan tahun 2024 triwulan III capaian tersebut terdapat penurunan berdasarkan tangkapan layar dari portal SIDAK. Nilai capaian triwulan III tersebut lebih kecil jika dibandingkan capaian nilai pada periode triwulan II sebesar 100 %.

## 3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan dokumen Renstra, indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja sampai dengan triwulan III telah terdapat capaian melebihi target, dengan efektifitas capaian sebesar 118,59 %.

## 4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja telah berhasil dicapai oleh SKIPM Aceh. Terdapat 1 (satu) rekomendasi yang sedang dalam tahap proses tindak lanjut dan menunggu hasil verifikasi pada obyek pengawasan kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh tim Inspektorat Jenderal KKP. Hal ini terus diupayakan oleh SKIPM Aceh untuk memperbaiki kinerja pada masa yang akan datang. Komitmen pimpinan dan seluruh

pegawai diperlukan agar seluruh rekomendasi atau saran yang diberikan dan dengan menyampaikan dokumen tindak lanjutnya secara tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang diberikan.

#### 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait anggaran, karena secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja. Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan pemantauan dan evaluasi.

#### 6. Realisasi Anggaran

Secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja. Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan pemantauan dan evaluasi.

#### 7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang dilaksanakan setiap periode dan melakukan tindak lanjut pemenuhan dokumen atas rekomendasi Inpektorat Jenderal sesuai dengan ketentuan. Berikut tabel target dan realisasi indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja.

### 12.IKS. 03.5 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan suatu ukuran kuantitatif yang mencerminkan aspek teknis dan administratif dan tata kelola pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh satker K/L.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Aspek pengukuran IKPA meliputi aspek : kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran; kualitas implementasi pelaksanaan anggaran; dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan

variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM.

Secara teknis aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan telah terintegrasi dengan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan yang mengintegrasikan seluruh aplikasi satker dengan fungsi utama dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

### 1. Capaian Indikator Kinerja

Indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mempunyai target dengan pengukuran secara semester. Pada tahun 2024, indikator kinerja ini memiliki target tahunan dengan nilai sebesar 93,75, dan target semester I sebesar 83. Pada periode triwulan III tidak dilakukan perhitungan. Capaian indikator tersebut sesuai dengan data dari aplikasi OM-SPAN modul Monev PA yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berikut ditampilkan tabel target dan realisasi serta bukti dukung capaian indikator kinerja ini.

**Tabel. 16**  
**Target dan Realisasi IKS 03.5 Tahun 2024 Triwulan III**

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT BPPMHKP Aceh / Nilai	-	98,28	97,02	96,17	97,47	99,19	-	-	-	-	-	-	-

### 2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada periode tahun 2023 triwulan III tidak terdapat target dan capaian.

### 3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Berdasarkan data Renstra indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari 2 tahun sebelumnya, terdapat peningkatan capaian kinerja, yaitu pada tahun 2022 sebesar 96,17 dan tahun 2023 sebesar 97,47. Nilai capaian tahun 2024 akan diperhitungkan kembali di periode akhir tahun atau semester II.

#### 4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Secara umum capaian indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) telah tercapai melebihi target yang ditetapkan. Hal ini merupakan upaya seluruh tim di SKIPM Aceh untuk melakukan pemenuhan ketentuan yang menjadi indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

#### 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait anggaran, karena secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan pemantauan dan evaluasi. Selain itu terdapat efisiensi penggunaan sumber daya yaitu dengan dilakukan oleh para pegawai yang berkompeten di bidangnya dalam pencapaian target kinerja serta terdapat pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung capaian kinerja target tersebut.

#### 6. Realisasi Anggaran

Secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan pemantauan dan evaluasi.

#### 7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan SKIPM Aceh untuk meningkatkan nilai IKPA adalah dengan terus berupaya memenuhi ketentuan kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan indikator pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM untuk periode mendatang.

### 13. IKS. 03.6 Nilai Kinerja Anggaran

Nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau *output/outcome* kegiatan, berdasarkan PMK No. 249/2011. Dalam perhitungannya dilakukan secara otomatis melalui aplikasi SMART Kementerian Keuangan. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$NK = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (PK \times W_{pk}) + (E \times W_e)$$

Nilai Kinerja aspek implementasi :

- P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker (Bobot Penyerapan Anggaran (WP) =9,7%)
- K : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK)=18,2%)
- PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) =43,5%)
- E : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot Efisiensi (WE) =28,6%).

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi :

1. Aspek implementasi : evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.
2. Aspek manfaat : evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/ Lembaga.
3. Aspek konteks : evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan pemerintah.

Kategori capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain : Sangat Baik (Nilai NKA > 90); Baik (Nilai NKA 80 - 90); Cukup (Nilai NKA 60 – 80); Kurang (Nilai NKA 50 – 60); Sangat Kurang (Nilai NKA ≤ 50);

## 1. Capaian Indikator Kinerja

**Tabel. 17**  
**Target dan Realisasi IKS 03.6 Tahun 2024 Triwulan III**

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPPMHKP Aceh / Nilai	-	-	86,80	85,65	85,24	-	-	-	-	82	-	82	-

Pada tahun 2024, terdapat target indikator nilai kinerja anggaran sebesar 82. Nilai tersebut dihitung dalam periode tahunan secara otomatis berdasarkan data di aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan yang terintegrasi dengan aplikasi SMART DJA. Untuk periode triwulan III tidak terdapat target dan capaian indikator nilai kinerja anggaran, karena seluruh komponen baru dapat dilakukan pengukuran pada periode tahunan. Namun SKIPM Aceh setiap bulannya aktif berpartisipasi dalam melakukan input dan update data di portal SAKTI tepat waktu.

## 2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data capaian kinerja indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2023 dan tahun 2024 triwulan III tidak terdapat target dan capaian karena sistem perhitungan indikator kinerja dilakukan secara tahunan.

## 3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Target indikator kinerja Nilai Kerja Anggaran pada dokumen Renstra adalah sebesar 82. Terdapat perubahan pola perhitungan nilai kinerja anggaran pada tahun 2022 yang diterapkan pada aplikasi SMART. Pada triwulan III tidak dapat dilakukan perbandingan capaian dengan target pada Renstra karena sistem perhitungan secara tahunan.

## 4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Analisa keberhasilan yang dapat mendukung indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran adalah disebabkan oleh adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu dan dilakukan monitoring secara berkala terhadap penyerapan anggaran, konsistensi dan capaian output.

## 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait anggaran, karena secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran. Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan pemantauan dan evaluasi. Selain itu terdapat efisiensi penggunaan sumber daya yaitu dengan dilakukan oleh para pegawai yang berkompeten di bidangnya dalam pencapaian target kinerja serta terdapat pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung capaian kinerja target tersebut.

## 6. Realisasi Anggaran

Secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan pemantauan dan evaluasi.

## 7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilakukan SKIPM Aceh untuk meningkatkan nilai NKA adalah dengan terus berupaya memenuhi ketentuan dalam pelaporan di aplikasi SAKTI serta melakukan strategi untuk menjaga konsistensi rencana penarikan (awal) dengan realisasi anggaran serta rencana penarikan anggaran (revisi). Selain itu meningkatkan konsistensi penginputan capaian realisasi output (CRO) secara periodik atau perbulan, yang mana mewajibkan partisipasi seluruh satuan kerja pelaksana anggaran untuk melakukan entri data pada aplikasi SAKTI yang terintegrasi antara lain memuat program, realisasi anggaran dan volume output kegiatan, serta mencakup variabel penyerapan, konsistensi, CRO, dan efisiensi. Selain itu akan dilakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan indikator kinerja melalui SMART DJA melalui <https://monev.kemenkeu.go.id>.

#### 14. IKS. 03.7 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa

Indikator kinerja tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun KIPM Aceh adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup SKIPM Aceh. dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ secara umum diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan

Pada tahun 2024 indikator kinerja nilai tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa mengalami kenaikan target menjadi sebesar 80 % dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 77,50. Nilai tersebut merupakan gambaran kegiatan pengadaan barang/jasa stasiun kerja yang mewakili seluruh unsur yang menjadi parameter penilaian. Secara detail nilai tersebut terdiri dari unsur ketersediaan manajemen resiko sebesar 8,35 %; perencanaan dan persiapan sebesar 10,40 %; presentase pemilihan penyedia yang dilaksanakan melalui SPSE sebesar 3,30 %; kesesuaian tahap pelaksanaan sebesar 37,46 %; laporan penyelenggaraan PBJ sebesar 3,75 %; serta persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan sebesar 15 %.

##### 1. Capaian Indikator Kinerja

**Tabel. 18**  
**Target dan Realisasi IKS 03.7 Tahun 2024 Triwulan III**

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	%
1	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPPMHKP Aceh / %	-	-	-	76,21	78,26	-	-	-	-	80	-	80	-

Pada tahun 2024 periode triwulan III tidak terdapat target dan capaian indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa, karena seluruh komponen baru dapat dilakukan pengukuran pada periode tahunan. Namun SKIPM Aceh setiap bulannya aktif berpartisipasi dalam melakukan input dan update data di portal pengadaan secara tepat waktu.

## 2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data capaian kinerja indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa pada tahun 2023 dan tahun 2024 triwulan III tidak terdapat target dan capaian karena sistem perhitungan indikator kinerja dilakukan secara tahunan.

## 3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Target indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa pada dokumen Renstra adalah sebesar 80. Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2022, sehingga pada tahun sebelumnya belum ada. Pada triwulan III tidak dapat dilakukan perbandingan capaian dengan target pada Renstra karena sistem perhitungan secara tahunan.

## 4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Analisa keberhasilan yang dapat mendukung indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa adalah ditentukan oleh adanya komitmen pimpinan dan tim pengadaan barang dan jasa terhadap pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

## 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait yaitu dengan dilakukan oleh para pegawai yang berkompeten di bidangnya dalam pencapaian target kinerja serta terdapat pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung capaian kinerja target tersebut.

## 6. Realisasi Anggaran

Secara khusus tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa. Secara gabungan, terdapat anggaran pada bidang dukungan manajemen internal pada komponen layanan operasional perkatoran.

## 7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja nilai tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa adalah dengan membuat perencanaan realisasi pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan koordinasi dengan tim internal dan pusat terkait. Pada periode selanjutnya, SKIPM Aceh berupaya untuk terus meningkatkan nilai kepatuhan pengadaan barang/jasa dengan memenuhi ketentuan yang berlaku dan memenuhi seluruh unsur-unsur yang menjadi parameter penilaian.

## 15. IKS. 03.8 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN

Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup SKIPM Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada pengguna atau kuasa pengguna barang dan pengelola barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (12,5 %);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal 2024 (25 %);
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang tahun 2024 (25 %);
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST) / Berita Acara Pemakaian (25 %)
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (12,5 %).

### 1. Capaian Indikator Kinerja

**Tabel. 19**  
**Target dan Realisasi IKS 03.8 Tahun 2024 Triwulan III**

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	% Capaian
1	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPMHKP Aceh / %	-	-	-	97,50	96,57	-	-	-	-	80	-	-	-

Pada tahun 2024 indikator nilai tingkat kepatuhan pengelolaan BMN mengalami kenaikan nilai target menjadi 80 % dari tahun sebelumnya sebesar 77,5 %. Untuk periode triwulan III indikator kinerja ini tidak terdapat target dan capaian karena dilakukan perhitungan secara tahunan. Namun sampai dengan akhir triwulan III telah dilaksanakan tahapan-tahapan untuk memenuhi ketentuan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN yang telah ditentukan.

## 2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Berdasarkan data capaian kinerja indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN pada tahun 2023 dan tahun 2024 triwulan II tidak terdapat target dan capaian karena sistem perhitungan indikator kinerja dilakukan secara tahunan.

## 3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Target indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN pada dokumen Renstra adalah sebesar 80. Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2022, sehingga pada tahun sebelumnya belum ada. Pada triwulan III tidak dapat dilakukan perbandingan capaian dengan target pada Renstra karena sistem perhitungan secara tahunan.

## 4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Analisa keberhasilan yang dapat mendukung indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah ditentukan oleh adanya komitmen pimpinan dan pengelola BMN terhadap pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

## 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN dengan pemanfaatan teknologi informasi pada aplikasi SAKTI Modul GLP, Modul Aset Tetap dan Modul Persediaan.

## 6. Realisasi Anggaran

Pada sisi anggaran indikator kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan BMN dapat dikategorikan masuk pada anggaran gabungan di dukungan manajemen internal, yaitu layanan manajemen keuangan. Terdapat pagu anggaran sebesar Rp. 25.917.000,- dengan realisasi sampai dengan triwulan III sebesar Rp. 39.984.190,- atau setara dengan 86,59 %.

## 7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana aksi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja nilai tingkat kepatuhan pengelolaan BMN adalah dengan melakukan penertiban administrasi BMN dan melakukan inventarisasi BMN secara berkala. Pada periode selanjutnya, SKIPM Aceh berupaya untuk terus meningkatkan nilai kepatuhan pengelolaan BMN dengan memenuhi ketentuan yang berlaku dan memenuhi seluruh unsur-unsur yang menjadi parameter penilaian. Berikut data target dan realisasi indikator kinerja tersebut.

## 16.IKS. 03.9 Nilai Minimal Yang Diperyaratkan Untuk Meraih Predikat WBK

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Mengacu pada Pedoman dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan: penetapan status unit kerja berpredikat Menuju WBK yaitu dengan memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK  $\geq 75$  serta ditetapkan melalui SK Menteri KP dan Piagam Penghargaan. Selanjutnya dalam pelaksanaannya terdapat Peraturan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PER-IRJEN/2019 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP.

Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan Kementerian merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Predikat yang diperoleh merupakan *outcome* dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit pada lingkungan kerja. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM diharapkan tidak hanya dilakukan pada Unit Kerja yang menjadi *pilot project*, tapi juga dilakukan pada semua Unit Kerja yang berada di bawah tanggung jawab Unit Kerja eselon I, sebagai upaya percepatan pencapaian tujuan reformasi birokrasi. Unit Kerja yang telah mendapatkan predikat WBK/WBBM hendaknya dapat memotivasi Unit Kerja lain untuk meningkatkan pembangunan Zona Integritas di Kementerian.

Untuk menjaga terpeliharanya predikat WBK/WBBM, maka perlu dilakukan pembinaan yang efektif. Pembinaan harus dilakukan terhadap Unit Kerja secara institusional dan terhadap pegawai pada Unit Kerja yang bersangkutan. Pembinaan terhadap Unit Kerja dapat dilakukan dengan cara memberikan asistensi perbaikan sistem dan prosedur, pemberian fasilitas dan anggaran kedinasan yang memadai, pelatihan teknis, perbaikan kesejahteraan, kenaikan pangkat istimewa, mendapatkan prioritas tambahan anggaran dalam APBNP atau kegiatan lainnya yang kesemuanya mengarah pada tujuan untuk mempersempit peluang/kesempatan melakukan korupsi. Selain itu juga dilakukan pembinaan karakter pegawai melalui pelatihan anti korupsi atau pembentukan integritas, pendekatan spiritual/keagamaan untuk memperbaiki atau meluruskan niat, sehingga memiliki kemauan dan kemampuan untuk meninggalkan sikap dan perbuatan koruptif serta perbuatan yang melanggar hukum lainnya.

Perhitungan capaian indikator kinerja ini dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal yang memberikan penilaian terhadap pelaksanaan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Dengan nominal nilai total sebesar 75 dengan rincian bobot nilai per area pengungkit ( pemenuhan dan reform) minimal 60 % dan hasil sebesar 40 %.

## 1. Capaian Indikator Kinerja

**Tabel. 20**  
**Target dan Realisasi IKS 03.9 Tahun 2024 Triwulan III**

NO	Indikator Kinerja / Satuan	Realisasi					Tahun 2024						Renstra 2020-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi Periode Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target Tahunan PK	% Capaian PK	Target	% Capaian
1	Nilai Minimal Yang Diperkirakan Untuk Meraih Predikat WBK Lingkup BPPMHKP Aceh / Nilai	-	-	-	-	66,99	-	-	-	-	75	-	75	-

Pada tahun 2024 indikator kinerja Nilai Minimal Yang Diperkirakan Untuk Meraih Predikat WBK mempunyai target sebesar 75 %. Untuk periode triwulan III tidak terdapat target maupun capaian indikator kinerja ini. Pengukuran capaian indikator kinerja nilai unit kerja SKIPM Aceh merupakan target tahunan, sehingga belum dilakukan pengukuran capaian, namun demikian telah dilakukan beberapa upaya untuk mendukung indikator kinerja tersebut.

## 2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Periode Sebelumnya

Capaian indikator kinerja nilai minimal yang diperkirakan untuk meraih predikat WBK SKIPM Aceh pada tahun 2023 dan tahun 2024 merupakan target tahunan, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan pengukuran capaian pada periode pengukuran saat ini.

## 3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

Target nilai minimal yang diperkirakan untuk meraih predikat WBK adalah sebesar 75. Indikator ini pada tahun 2023 mulai dimasukkan ke dokumen kinerja. Sampai dengan periode triwulan III tahun 2024 indikator ini belum dilakukan penilaian, sehingga belum dapat dilakukan perbandingan capaian dengan target Renstra.

## 4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Faktor pendukung keberhasilan pembangunan zona integritas adalah adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai dalam membangun zona integritas, penerapan budaya kerja BerAKHLAK, peningkatan integritas, peningkatan layanan, peningkatan kinerja serta penciptaan inovasi. Pemenuhan dokumen pengungkit dan reform pembangunan zona integritas sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 terus dilakukan update oleh seluruh tim.

Merujuk pada hasil capaian indikator kinerja Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk Meraih Predikat WBK Lingkup Stasiun KIPM Aceh tahun 2023 yang belum memenuhi target sebesar 75. Rencana tindak lanjutnya, antara lain dilakukan upaya penemuan dan *update* dokumen data dukung (*evidence*) pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM sesuai dengan rekomendasi Tim Penilai Internal (TPI) KKP agar terpenuhi target pada tahun 2024. Selain itu pada bulan Maret 2024 telah dilakukan pembinaan pengelolaan dan pencapaian kinerja organisasi, khususnya terkait indikator Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Meraih Predikat WBK oleh tim Sekretariat BPPMHKP.

#### 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya oleh seluruh pegawai yang terlibat dalam mendukung indikator kinerja nilai minimal yang dipersyaratkan untuk meraih predikat WBK, salah satunya dengan penggunaan teknologi untuk mengikuti pelatihan pelatihan terkait.

#### 6. Realisasi Anggaran

Dari sisi anggaran, indikator kinerja nilai minimal yang dipersyaratkan untuk meraih predikat WBK didukung oleh anggaran gabungan yang terdapat di dukungan manajemen internal yang mana terdapat sub komponen pemeliharaan integritas telah terealisasi sebesar Rp. 2.860.000,-.

#### 7. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Pada periode selanjutnya, besar harapan melalui terbentuknya struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan terbaru, khususnya setelah terbentuknya Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) dan bergabungnya Badan Karantina Indonesia (BKI). Secara bertahap seluruh elemen dan SDM UPT khususnya di wilayah Aceh dibawah BPPMHKP mampu menciptakan inovasi baru dan memenuhi seluruh unsur penialaian pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Dimana indikator kinerja Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk Meraih Predikat WBK dan WBBM memiliki beberapa unsur yang menjadi penilaian yaitu manajemen perubahan; penataan tata laksana; penataan sistem manajemen SDM aparatur; penguatan akuntabilitas; penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

### 3.3. Anggaran

Rencana kerja dan anggaran Stasiun KIPM Aceh tahun 2024 diarahkan untuk target-target kinerja pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan. Alokasi anggaran SKIPM Aceh tahun 2024 berdasarkan data RKAKL dengan pagu terbaru adalah sebesar Rp. 4.901.646.000,-. Nilai persentase realisasi anggaran atau keuangan SKIPM Aceh pada tahun 2024 hingga akhir bulan September tahun 2024 terserap sebesar 74,81 %, dengan nilai Rp. Rp. 3.666.756.402, . Pencapaian atau realisasi ini tentunya adalah upaya maksimal yang dapat dilakukan dan merupakan hasil kerja sama seluruh komponen di SKIPM Aceh.

Selama periode triwulan III terdapat perubahan pagu anggaran, baik karena realokasi anggaran karantina ikan, *automatic adjustment* maupun karena revisi administrasi. Strategi atau rencana untuk periode selanjutnya, SKIPM Aceh akan lebih memperkuat sisi perencanaan kegiatan dan lebih cermat dalam melakukan pencairan sesuai dengan jadwal yang telah disusun dan ditetapkan, dan secara periodik akan dilakukan konsolidasi serta monitoring dan evaluasi. Selain itu SKIPM Aceh berupaya adaptif melakukan upaya mitigasi resiko dan realistis dalam menghadapi kebijakan-kebijakan atau penyesuaian otomatis yang masih diterapkan dalam pengelolaan anggaran pada periode selanjutnya.

Gambar. 10

Komposisi Pagu dan Detail Realisasi Tahun 2024 Triwulan III



Sumber : <https://e-monev.bappenas.go.id/2024/K8>

Gambar. 11

Komposisi Alokasi dan Realisasi dan Partisipasi Satuan Kerja Tahun 2024 Triwulan III



Sumber : <https://monev.kemenkeu.go.id>

3.4. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Stasiun KIPM Aceh berdasarkan data sistem informasi kepegawaian hingga bulan September tahun 2024 sebanyak 16 orang PNS dan Non P N S sebanyak 11 orang. Berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja terbaru, dimana dengan terbentuknya BPPMHKP. Terdapat perubahan susunan manajemen pegawai di wilayah Aceh setelah terbentuknya BKI Aceh, dimana beberapa pegawai telah berpindah ke organisasi tersebut. Berikut data jumlah pegawai di SKIPM Aceh sampai dengan bulan September tahun 2024:

**Tabel. 21**  
**Data Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan**

No	Jenis Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Struktural (Kepala SKIPM Aceh)	1 Orang
2	Ketua Tim Kerja a. Dukungan Manajemen / Analisis Pengelolaan Keuangan APBN b. Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Inspektur Mutu Hasil Perikanan c. Pengawasan, Pengendalian dan Informasi / Inspektur Mutu Hasil Perikanan d. Penerapan Standard dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Inspektur Mutu Hasil Perikanan	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang
3	Fungsional Tertentu : a. Asisten Inspektur Mutu b. Pranata Komputer	3 Orang 1 Orang
4	Fungsional Umum a. Analisis Mutu Hasil Perikanan b. Analisis SDM Aparatur c. Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan d. Bendahara Pengeluaran e. Pengadministrasi Bahan Pengawasan dan Pengendalian f. Pengelola Layanan Operasional	2 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang
5	Tenaga Non PNS	11 Orang
<b>Total</b>		27 Orang

**Tabel. 22**  
**Data PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Magister (S2)	4 Orang
2	Sarjana / Diploma IV (S1/DIV)	8 Orang
3	Diploma 3 (D3)	3 Orang
4	SLTA / Sederajat	1 Orang

---

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Sebagai salah satu satuan kerja pemerintah, peningkatan pelayanan serta semakin akuntabel terhadap pelaksanaan anggaran merupakan sebuah upaya yang harus dilakukan. Laporan kinerja ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan diharapkan terjadi peningkatan dalam pencapaian indikator kinerja tiap tahunnya. Stasiun KIPM Aceh terus berupaya melakukan pembenahan dalam internal organisasinya untuk mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan. Dengan segala upaya yang telah dilakukan tersebut diharapkan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Pengukuran kinerja di SKIPM Aceh dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 16 (enam belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan data pada aplikasi kinerja SKIPM Aceh. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) September Tahun 2024 adalah sebesar 114,35 (istimewa), dengan sebanyak 4 (empat) indikator kinerja tercapai melebihi target dan 2 (dua) mencapai target, sedangkan indikator lainnya belum dilakukan perhitungan karena tidak ada target. Selanjutnya perlu dilakukan beberapa penyesuaian dan strategi agar capaian atau realisasi indikator kinerja SKIPM Aceh dapat terus meningkat dan sesuai dengan yang diharapkan dan memenuhi ketentuan SMART.

Secara umum, capaian sasaran strategis dan indikator kinerja SKIPM Aceh yang disepakati pada perjanjian kinerja tahun 2024 telah tercapai sesuai rencana. Hal ini diharapkan menjadi pembelajaran yang baik dalam pelaksanaan pada periode berikutnya. Tantangan yang dihadapi SKIPM Aceh ke depan semakin luas sebagai akibat dari meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pengendalian mutu dan pengawasan hasil perikanan; serta belum optimalnya daya saing produk perikanan Indonesia. Selain itu, salah satu tantangan yang perlu dipersiapkan kedepan adalah adanya perubahan atau penyesuaian struktur organisasi dan tata laksana kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan sebagai bagian dari upaya mendukung reformasi birokrasi dimana BPPMHKP menjadi Otoritas Kompeten terhadap pemenuhan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Kondisi di atas secara langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tugas dan fungsi SKIPM Aceh ditandai dengan semakin besarnya beban kerja dan kompleksitas tugas; semakin meningkatnya kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM aparatur; perlunya pemantapan regulasi dan sistem pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan yang efektif dan harmonis; perlunya kesiapan sarana prasarana guna pemenuhan standar dan persyaratan pengawasan/pemeriksaan/pengujian dalam rangka peningkatan daya saing, nilai tambah dan kepercayaan stakeholder.

---

## 4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja SKIPM Aceh dan sebagai upaya peningkatan kinerja pada periode selanjutnya terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik agar pelaksanaannya lebih efektif dan sesuai rencana aksi yang mendukung pencapaian target indikator kinerja.
- Melakukan optimalisasi dan efisiensi sumber daya manusia (SDM) dengan perencanaan dan monitoring matrik peran hasil dalam pengelolaan kinerja pegawai yang mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Demikian laporan kinerja SKIPM Aceh tahun 2024 triwulan III ini dibuat, semoga laporan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Saran dan masukan yang sifatnya membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan pengelolaan dan pelaporan kinerja SKIPM Aceh pada masa yang akan datang.



